

**PENGATURAN IZIN PEMAKAIAN SENJATA API OLEH
MASYARAKAT SIPIL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Ebnu Dwi Nugroho

NIM.16501010711179



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengaturan Izin Pemakaian Senjata Api**
oleh Masyarakat Sipil Dalam Hukum
Positif Indonesia

Identitas Penulis

a. Nama : **Ebnu Dwi Nugroho**

b. Nim : **165010107111179**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : **9 Bulan**

Disetujui pada tanggal : 9 Juli 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nurini Aprillianda, S.H. M.Hum.

NIP 197604292002122001



Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

NIP 198408162015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP 196705031991032002

HALAMAN PENGESAHAN

Pengaturan Izin Pemakaian Senjata Api oleh Masyarakat Sipil Dalam Hukum

Positif Indonesia

SKRIPSI

Oleh:

Ebnu Dwi Nugroho

165010107111179

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal

..... dan disahkan pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nurini Aprillianda, S.H. M.Hum.

Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H.

NIP 197604292002122001

NIP 198408162015042002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP 196705031991032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang karena dakwahnya kami dapat menikmati iman dan islam.

Skripsi ini penulis buat dalam rangka memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu kelancaran dan penulisan makalah ini, baik berupa masukan maupun kritik membangun demi perbaikan tulisan ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum universitas Brawijaya
5. Ibu Dr. Nurini Aprillianda, S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar membimbing, memberikan petunjuk dan arahan yang disampaikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah sabar membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Shanti Riskawati, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Penasihat Akademik
8. Ibunda Melida dan Ayahanda M. Taufan Heriyanto selaku orang tua, Dita Kartika Sasi, S.Si. selaku kakak saya, Fatchilla Anggraini dan Gadis Pratiwi Handayani selaku adik saya serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan doa restu dan segala dukungan serta motivasi kepada penulis
9. Teman-teman "RISALAH 16" Himpunan mahasiswa Islam HUKUM BRAWIJAYA
10. Teman-teman "MANIFEST 16" Fakultas Hukum Brawijaya
11. Teman-teman "HIMAKOPI 16" Fakultas Hukum Brawijaya
12. Serta kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah ikhlas membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, Oleh karenanya tidak lepas dari kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Maka merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis apabila penelitian ini diberi kritik atau saran dari para pembaca. Semoga dengan adanya hasil karya pemikiran yang berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat banyak pihak.

Malang, 10 April 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Orisinalitas Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
1. Kajian Umum tentang Senjata Api	15
2. Kajian Umum tentang Masyarakat Sipil	20
3. Kajian Umum Tentang Hukum Positif Indonesia	26
4. Kajian Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Apakah Kelemahan pengaturan izin pemakaian senjata api oleh masyarakat sipil dalam hukum positif Indonesia	40
B. Bagaimana pengaturan izin pemakaian senjata api dalam hukum positif Indonesia dimasa yang akan datang dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat	54
BAB IV	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
Daftar Pustaka	64

DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian terdahulu.....	5
Table 2. Tipe lisensi senjata berdasar Czech Firearms Act.....	56
Table 3. Konsep lisensi untuk penerapan di Indonesia.....	60

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



RINGKASAN

Ebnu Dwi Nugroho, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2021
Pengaturan Izin Pemakaian Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Dalam Hukum Positif Indonesia, Dr. Nurini Aprillianda, S.H. M.Hum., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengaturan Izin Pemakaian Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Dalam Hukum Positif Indonesia. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat sipil di Indonesia. Disini penulis juga sedikit membandingkan dengan Negara Republik Ceko terkait pengaturan pemakaian dan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang mana di Negara Ceko penyalahgunaan senjata api sangat minim terjadi, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan atas regulasi pengaturan diantara kedua negara tersebut. Ada beberapa konsep yang diterapkan di Negara Ceko namun masih belum di terapkan di Negara Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah kelemahan pengaturan izin pemakaian senjata api oleh masyarakat sipil dalam hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan izin pemakaian senjata api dalam hukum positif Indonesia dimasa yang akan datang dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat?

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan interpretasi gramatikal dan sistematis.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah bahwa pengaturan izin pemakaian dan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015, yaitu harus memenuhi syarat medis dan psikologis, lulus uji psikotes, lulus uji kelayakan, belum pernah melakukan tindak pidana, berusia 21-65 tahun dan telah memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA). Namun masih terdapat kelemahan yang menjadi salah satu faktor penyebab tingkat penyalahgunaan senjata api tidak lekas membaik, yaitu pada saat proses perpanjangan surat izin penggunaan senjata api yang dikeluarkan oleh Kepolisian tidak adanya test ulang terhadap kondisi medis dan psikologis serta kelayakan setiap orang, sedangkan setiap bulannya banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam sebulan yang mempengaruhi kondisi medis dan psikologis serta masih layak atau tidak seseorang mengantongi izin menggunakan senjata api. Konsep pengaturan kepemilikan senjata api dalam hukum positif Indonesia dimasa yang akan datang dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat ialah dengan konsep pengurangan tahap tes medis dan psikologis serta kelayakan setiap masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan surat izin pemakaian senjata api dengan perubahan pasal yang mengatur mengenai perpanjangan surat izin pemakaian senjata api dengan menambahkan syarat tes kesehatan dan psikologis serta melakukan uji kelayakan sebagai syarat melakukan perpanjangan izin. Kemudian pada konsep selanjutnya, penulis memberikan solusi untuk adanya penjabaran lebih lanjut mengenai pengglongan batasan usia untuk kepemilikan dan pemakaian senjata api disesuaikan dengan kebutuhan msyarakat dengan waktu dan jenis senjata api yang disesuaikan dengan kategori yang nantinya ada.

SUMMARY

Ebnu Dwi Nugroho, Criminal Law, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2021 The Regulation of Permit Usage Firearm by Civil Society in Indonesia's Positive Law, Dr. Nurini Aprillianda, S.H., M.Hum., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

In this research, the researcher discusses about Juridical Review of The Limitation of Ownership Firearm by Civil Society in Indonesia's Positive Law. The background of choosing the topic because a lot of misappropriation the firearm by civil society in Indonesia. And the researcher also showed the comparison about the regulation of ownership firearm in Republic of Czech that the misappropriation of firearm in Republic of Czech was a bit, because there are differentiation about the regulation between the state. There are several concepts which already applied in Czech State while in Indonesia haven't yet.

This researcher formulates two problems of study : (1) What The Regulation of Permit Usage Firearm by civil society in Indonesia's Positive Law, (2) How the regulation of ownership firearm by civil society in Indonesia's Positive Law in the future in order to create security and public order.

This research used normative juridical method with statute approach, conceptual approach, and comparison approach. The acquired legal materials are analyzed used analytical technique descriptive, grammatical interpretation, and systematic.

The result of the research showed that the researcher found the answer of the problem of study that the criteria of the limitation of ownership firearm by civil society in Indonesia's Positive Law have been regulated in regulation of Perkapoli Number 18, 2015. This regulation for fill the requirement of medical and psychological, pass of psychological test, pass of expediency test, never have criminal, are 21- 65 years old and fill the administration requirement and have a Izin khusus Hak Senjata Api (IKHSA) . However, there are still a weakness which are one of the factors that cause of level the misappropriation of firearm not getting better. During the process of extension of the licence for using firearm out by the police there is no retest in medical, psychological, and expediency of each person, while in every month there are possibilities that will affect to the medical condition and psychological, and also is still suitable or not for someone will have the licence of using the firearm. The concept of regulation of ownership firearm in Indonesia's positive law in the future to create security and public order is the article changing to regulate the extension of licence of using firearm and added medical test requirement and psychological test, and also expediency test as the requirement to extend the licence . For the next researcher can dig deeper about classification of age limit for ownership and the firearm suitable with the society necessary by time, and also the firearm that suitable for existing category.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat, maka setiap tindakan manusia yang dilarang dapat di kategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran dan akan dijatuhi hukuman atau pidana. Namun manusia sebagai pribadi yang mempunyai kebebasan yang pada dasarnya dapat berbuat apa saja secara bebas. Pidana dengan segala manifestasinya pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk memberantas atau mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, mengenai penjatuan hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat kembali kepada masyarakat atau dalam perkataan lain menjadi orang yang baik.

Di dalam kehidupan masyarakat sipil ada beberapa profesi atau jenis pekerjaan yang membutuhkan pengamanan lebih itu dikarenakan oleh tingkat resiko kejahatan, gangguan, dan ancaman yang akan diterima oleh profesi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan profesi atau jenis pekerjaan lainnya, contohnya seperti tenaga kesehatan, pegawai bank, pengacara, dan beberapa profesi lainnya, maka dari itu beberapa profesi tersebut biasanya melindungi diri mereka dengan menggunakan jasa pengawalan atau bahkan memiliki alat untuk melakukan pembelaan diri seperti Senjata Api dan sebagainya demi tuntutan profesinya yang memiliki resiko tinggi dalam pekerjaannya. Selain itu juga pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk melindungi diri dan hartanya dari ancaman pihak lain. Setiap orang juga memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya manusia dapat berbuat apa saja secara bebas, bahkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri maupun

kebutuhan melanjutkan keturunan.¹ Oleh karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya sendiri termasuk dengan cara menggunakan, memiliki, dan atau menguasai senjata api dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang perubahan atas *Ordonantie Tijdelijke Byondere Strafbepalingen* (Stbl 1948 no 17) dan Perppu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut Undang-Undang Mengenai Senjata Api. Dari peraturan-peraturan tersebut diatur bahwa penggunaan Senjata Api di kalangan masyarakat sipil dibenarkan oleh undang-undang dengan syarat ijin dari kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat berwenang yang ditunjuknya.

Penerapan kebijakan penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil di berbagai negara bervariasi: Pertama, memberikan kewenangan menguasai Senjata Api terhadap Polisi dan Tentara saja dan melarang masyarakat sipil untuk menguasai senjata api seperti di negara Jepang; Kedua, masih memungkinkan anggota masyarakat sipil tertentu memiliki senjata api seperti di Indonesia; Ketiga, membebaskan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api, ini digunakan di negara Finlandia.²

Sikap pro dan kontra dalam penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil seringkali muncul ketika terjadi penyalahgunaan senjata api terhadap masyarakat sipil yang menjadi yang menjadi korban kejahatan bersenjata api. Banyak pihak yang mengusulkan untuk mempersenjatai anggota masyarakat tertentu yang karena jabatannya, kekayaannya, atau karena memang resiko pekerjaan yang dimilikinya cukup tinggi terhadap kejahatan. Sementara pihak lain lebih mendorong pihak kepolisian agar lebih keras dalam penanganan masalah kejahatan bersenjata api.

Salah satu masalah yang memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah adalah masalah kepemilikan senjata api. Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran

¹ Suharto, **Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana**, Pramedia Group, Jakarta, 2013, hlm 3.

² <https://seykab.go.id/penguasaan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21.42

suatu propelan. Dengan demikian masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan berisiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bahkan orang banyak. Meskipun senjata api sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempersenjatai diri, mempertahankan, membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namaun apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,terlebih lagi dengan peredaran senjata api yang dilakukan secara ilegal maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, banhyak kasus-kasus mengenai senjata api ilegal maupun yang legal terjadi. Penyalahgunaan senjata api adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah benda/alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri yang mana akibatnya jika tertembak senjata api dapat mengakibatkan luka bahkan kematian. Dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Apabila dicermati upaya yang dilakukan pihak penegak hukum masih dapat dirasa kurang maksimal dalam menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata api dan penggunaannya. Diikuti dengan berkembangnya era globalisasi saat ini dengan segala informasi, teknologi dan kebudayaan yang berkembang sangat pesat hingga keseluruh dunia. Bahkan saat ini senjata api dapat diperjual belikan secara online baik secara legal maupun ilegal.

Senjata api yang didapatkan secara legalpun masih banyak saja yang disalahgunakan oleh pemiliknya yang mana penggunaannya tidaklah sesuai dengan tujuan ia memiliki senjata api tersebut yaitu untuk perlindungan diri apabila telah terancam keselamatannya. Namun terkadang pemilik dari senjata api sering kali bertindak semena-mena karena merasa memiliki kekuatan

berupa senjata api tersebut, sehingga melakukan penyalahgunaan senjata api yang dimilikinya. Contohnya seperti kasus yang terjadi di Jakarta terkait penodongan pistol kepada dua orang remaja oleh pelaku yang merupakan seorang pengusaha properti berinisial AM, lantaran merasa tersinggung ketika kedua orang remaja tersebut membicarakan mobil mewah yang dikendarai pelaku kemudian ia merasa tidak nyaman hingga sampai melakukan tembakan keudara dengan total sebanyak tiga kali tembakan pelaku cetuskan.³

Kemudian ada pula kasus penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil yang terjadi di sebuah tempat hiburan karaoke di Kota Malang, kejadian tersebut dikarenakan pelaku sedang mabuk dikarenakan akibat pengaruh minuman keras yang dikonsumsi pelaku tersebut, kemudian hingga terjadilah penembakan senjata api milik pelaku yang mana telah mengantongi surat ijin kepemilikan senjata api.⁴

Peningkatan terkait izin pemakaian senjata api dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Syarat dan mekanisme perizinan pemakaian senjata api bagi masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh POLRI termasuk ketat dengan syarat pertama mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian setempat, hanya saja dalam penerapannya terkadang masih kurang maksimal.

Hingga saat ini tindak kejahatan dan penyalahgunaan senjata api telah sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini telah membuat rasa aman masyarakat kian terkikis. Beberapa kasus memperlihatkan kejahatan dilakukan tak lagi menggunakan cara konvensional. Seperti beberapa contoh diatas, membuktikan maraknya tindak kejahatan dengan senjata api. Senjata api digunakan sebagai alat pelaku kejahatan menjalankan aksinya sekaligus perlawanan terhadap penegak hukum, baik yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, luka-luka, atau sekedar untuk menekan mental para korban.

Penyalahgunaan senjata api dalam kalangan masyarakat sipil menjadi kajian penting dalam ruang lingkup nasional dan internasional termasuk Indonesia sendiri dan dirasa masih belum dapat mengurangi terjadinya

³<https://nasional.okezone.com/read/2019/12/26/337/2146088/kompolnas-polisi-harus-perketat-pengawasan-penggunaan-senpi-oleh-warga-sipil> diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 10.38

⁴<https://jatim.sindonews.com/read/16884/1/mabuk-pria-di-kota-malang-tembakkan-senpi-di-tempat-karaoke-1575029467> diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 10.42

penyalahgunaan senjata api di kalangan masyarakat sipil yang memiliki tujuan untuk melakukan tindakan kejahatan yang memiliki dampak menakutkan bagi masyarakat sipil lainnya, dikarenakan sampai pada saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api itu masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tindak kejahatan yang sering terjadi itu seperti perampokan, pencurian bahkan pelaku pembegalan kendaraan bermotor pun melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan senjata api dan pelaku biasanya melakukan pengancaman terhadap korban atau bahkan langsung melepaskan tembakan ke arah korban yang mengakibatkan korban terluka parah atau bahkan sampai meninggal dunia. Sebelum ini sedikit disinggung tentang adanya pembatasan dalam izin pemakaian senjata api, namun dengan pembatasan itu tetap terjadi penyalahgunaan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **PENGATURAN IZIN PEMAKAIAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

B. Orisinalitas Penelitian

Table 1. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Leonard Kristianto Hamijoyo (Universitas Brawijaya)	Pelaksanaan pengawasan dan kewenangan polri terhadap kepemilikan senjata api berdasarkan pasal 15 ayat (2) undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (studi di Polda Jawa Timur)	1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan POLRI dalam mengawasi peredaran dan kepemilikan senjata api di masyarakat sipil? 2. Apa upaya dan solusi yang dilakukan oleh

		penelitian tahun 2013	POLRI dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Surabaya?
2.	Morvey Daniello (Universitas Brawijaya)	Penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api diluar pelaksanaan tugas jabatan oleh oknum Polri (studi di Polda Jawa Timur) penelitian tahun 2015	1. Bagaimana upaya POLDA JATIM menanggulangi penyalahgunaan senjata api yang dilakukan anggotanya diluar melaksanakan tugas jabatan? 2. Apa konsekuensi yuridis bagi anggota POLDA JATIM yang menyalahgunakan kewenangan senjata api diluar melaksanakan tugas jabatan?
3	Muhammad Yurwanra (Universitas Muhammadiyah Palembang)	Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil penelitian tahun 2016	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil? 2. Bagaimanakah tuntutan terhadap masyarakat sipil yang memiliki senjata api ilegal?

Pembeda :

1. Dalam penelitian diatas peneliti lebih berfokus secara teknis atas pelaksanaan pengawasan dan kewenangan polri serta upaya dalam penanggulangan terhadap kepemilikan senjata api yang beredar di masyarakat sipil di Surabaya. Sedangkan dalam penelitian saya lebih berfokus atas konsep dari kelemahan pengaturan izin pemakaian senjata api bagi masyarakat sipil di Indonesia.
2. Dalam penelitian diatas peneliti lebih berfokus atas penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api diluar pelaksanaan tugas jabatan oleh oknum Polri. Sedangkan dalam penelitian saya lebih berfokus atas penyalahgunaan senjata api di lingkup masyarakat sipil.
3. Dalam penelitian diatas penulis lebih berfokus atas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil yang diperoleh secara ilegal. Sedangkan dalam penelitian saya lebih berfokus atas kelemahan pengaturan izin pemakaian senjata api bagi masyarakat sipil yang telah diperoleh secara legal.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan dalam latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Apakah Kelemahan pengaturan izin pemakaian senjata api oleh masyarakat sipil dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan izin pemakaian senjata api dalam hukum positif Indonesia dimasa yang akan datang dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai sebagai pemecahan atas berbagai masalah yang diteliti (tujuan obyektif) dan untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan pengaturan izin pemakaian senjata api oleh masyarakat sipil dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan pengaturan izin pemakaian senjata api dalam hukum positif Indonesia dimasa yang akan datang dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik:

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teoritik penulis dan pembaca di bidang hukum pidana materiil terkhusus dalam:

- a. pengaturan terkait batasan izin pemakaian senjata api bagi masyarakat sipil dalam hukum positif di Indonesia,
- b. pengaturan terkait pemberian izin pemakaian senjata api bagi masyarakat sipil dalam hukum positif Indonesia dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Untuk masyarakat: Sebagai bahan informasi dan pengetahuan hukum tentang batasan dan izin pemakaian senjata api bagi masyarakat sipil
- b. Untuk Pihak Kepolisian Republik Indonesia: Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masukan bagi pihak Kepolisian untuk dijadikan bahan dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh oknum masyarakat sipil.
- c. Untuk pembuat kebijakan dan perancang peraturan perundang-undangan : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk di jadikan landasan untuk pembaharuan aturan mengenai batasan dan ijin pemakaian senjata api bagi masyarakat sipil.

F. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan cara melakukan telaah terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah "langkah untuk

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵ Jenis penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan tertulis atau berbagai bahan hukum lain. Penelitian ini mengkaji data-data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan batasan penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang serta regulasi yang terkait pada isu hukum yang diambil dalam penelitian.⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti dan mencari tahu kelemahan aturan perundang-undangan yang mengatur terkait batasan penggunaan dan pemberian ijin atas pemakaian senjata api bagi masyarakat sipil yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang perubahan atas *Ordonantie Tijdelijke Byondere Strafbepalingen* (Stbl 1948 no 17), Perppu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut Undang-Undang Mengenai Senjata Api, dan Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri.

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan adalah dengan melakukan perbandingan hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang negara lain atau putusan hakim satu negara dengan negara lain mengenai perkara yang sama.⁷ P. M. Bakshi berpendapat, tujuan dari pendekatan perbandingan adalah

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 3

⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Perdana Media, Jakarta, 2005. hlm 93

⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

untuk "*finding out what the law is in other countries, and considering whether it can be adapted, with or without modifications lead to law reforms or development of law*".⁸ Yang artinya adalah untuk mencari

tahu mengenai hukum apa yang ada di negara lain dan mempertimbangkan apakah dapat diterapkan, baik dengan atau tanpa modifikasi yang ditujukan untuk pembaharuan hukum atau pengembangan hukum. Dalam penelitian ini yang diperbandingkan ialah Undang-undang Tentang Senjata Api dan amunisi Negara Republik Ceko (Act on Firearms and Ammunition Of Czech Republik) dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api.

Alasan dipilihnya negara Republik Ceko sebagai perbandingan dikarenakan negara tersebut sangat berhasil dalam menekan terjadinya penyalahgunaan senjata api dengan cara menerapkan konsep penggolongan jenis lisesnsi dari senjata api berdasarkan usia serta kebutuhannya.

c) Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai preskripsi mengenai apa yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim :

1. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, **Penelitian Hukum**, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm. 131

⁹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta 1984, hlm.52

2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang perubahan atas Ordonantie Tijdelijke Byondere Strafbepalingen (Stbl 1948 no 17);
3. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Tentang Senjata Api dan amunisi Negara Republik Ceko (*Act on Firearms and Ammunition Of Czech Republik*);
4. Pasal 1 Perppu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut Undang-Undang Mengenai Senjata Api;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia;
6. Pasal 8 dan pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Sumber bahan ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini menggunakan literatur hukum yang terdiri dari buku, penjelasan undang-undang, jurnal, skripsi, maupun sumber berita lain yang terdapat pada media online maupun cetak.

c. Bahan Hukum Tersier :

Sumber bahan ini diperoleh melalui suatu bahan sebagai tambahan atau pelengkap bahan yang akan ditambahkan sebagai bahan argumentasi dalam pembahasan yang berhubungan dengan yang diteliti. Juga merupakan bahan yang digunakan sebagai bahan

¹⁰ *Ibid.*, hlm.52

pelengkap yang dapat membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Bahasa Indonesia;
3. Ensiklopedia.
4. Internet

d) Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran Bahan hukum diperoleh dengan cara menggunakan pendekatan studi keilmuan atau studi kepustakaan (*library research*). Studi keilmuan merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami berbagai literatur berkompeten dan menjurus pada akar permasalahan yang akan diteliti, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

e) Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan harus dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum.¹¹ Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa penafsiran hukum seperti penafsiran autentik, penafsiran menurut tata bahasa atau gramatikal, penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran teologis, dan juga penafsiran futuristik.¹² Dalam penelitian skripsi ini, penulis menganalisis bahan hukum yang ada dengan cara penafsiran secara :

1. Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis ini sendiri memiliki pengertian suatu metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹³

¹¹ Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20**, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 152

¹² Ibid.

¹³ Bambang Sutyoso, **Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan**, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 85

2. Interpretasi Gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.¹⁴

Penafsiran gramatikal merupakan suatu bentuk penafsiran yang disesuaikan menurut tata bahasa atau kata-kata, kata-kata dan bahasa merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya, oleh karena itu kata-kata itu harus singkat, jelas, dan tepat, tetapi untuk dapat mempergunakan kata-kata tersebut tidaklah mudah. Oleh karenanya apabila hakim ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan undang-undang, hakim harus menafsirkan kata-kata didalam undang-undang yang bersangkutan.¹⁵

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang teliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Setelah proses analisis, dilakukan proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan. Berikutnya ditarik simpulan yang bersifat umum, kemudian direkomendasikan beberapa hal sebagai upaya transfer gagasan.

f) Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini digunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut :

- a. Pembatasan adalah syarat yang menentukan atau membatasi penerapan kaidah kebahasaan. Arti lainnya dari pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi.

¹⁴ Sudikno Metokusumo, **Mengenali Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Jogjakarta, 2006, hlm. 171

¹⁵ Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 100

b. Pemakaian berasal dari kata dasar pakai, pemakaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

c. Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

d. Masyarakat sipil adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif yang terhimpun atas suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.

e. Hukum positif (Indonesia) adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum tentang Senjata Api

Sebelum mengenal senjata api, manusia menggunakan senjata tradisional dengan alat sederhana, seperti menggunakan busur panah atau ketapel. Setelah ditemukan bubuk mesiu untuk amunisi dan alat peledak, senjata api pun mulai berkembang diperadaban manusia. Penggunaan senjata api secara global pada perang dunia pertama menyebabkan penyebaran dan perkembangan inovasi dari senjata api sebagai alat pertahanan diri maupun alat serang. Pada masa sekarang senjata api digunakan sebagai senjata pertahanan diri, sebagai sarana olahraga tembak reaksi, dan Berburu Hewan.

1.1. Pengertian Senjata Api

Senjata api dapat diartikan suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Lebih jauh dijelaskan dalam ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang juga senjata api adalah :

1. Bagian-bagian dari senjata api;
2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya;
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya;

4. Slachtpistolen (pistol penembelih/pemotong);
5. Sein pistolen (pistol isyarat);
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Berdasarkan Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah :

1. Senjata gas air mata yang berbentuk : pistol/revolver gas, stick/pentungan gas, spray gas, gantungan kunci gas, extinguising gun/pemadam api ringan, pulpen gas, dll;
2. Senjata kejutan listrik yang berbentuk : stick/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dll;
3. Senjata Panah : model cross bow (senjata panah), panah busur, dll;
4. Senjata tiruan/replika;
5. Senjata angin kaliber 4,5 mm;
6. Alat pemancang paku beton.

Sedangkan menurut Surat Direktur Intelpam Nomor : R/SWD-368/VII/1998/Dit LPP tertanggal 24 Juli 1998, senjata api tiruan :

1. Senjata api type clock 17 pistol dari plastik;
2. Crossman 50 caliber poin gun;
3. The cat pistol;
4. Marksman semi auto pistol;
5. 22 black revolver mini cross bow;
6. Mainan berbentuk senjata api asli;
7. Replika senjata mainan menyerupai senjata api;
8. Alat keamanan/bela diri yang sejenis.

Dengan demikian, yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh Senjata Api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam definisi dan kriteria Senjata Api.

1.2. Pengaturan tentang senjata api (kepemilikan dan pembatasan kepemilikan)

Menurut Instruksi presiden RI No. 9 tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Yang menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Penggunaan senjata api juga diperbolehkan di Indonesia untuk kalangan sipil penggunaannya diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api.

Berdasarkan pasal 9 UU No 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Polri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin pemakaian senjata api. Berkaitan dengan undang-undang tersebut. Dimana Polri memperbolehkan masyarakat sipil menguasai senjata api.

Berikut dasar hukum penggunaan senjata api di Indonesia :

1. UU No 8 Tahun 1948

Undang-undang ini mengatur mengenai pendaftaran dan pemberian izin penggunaan senjata api. Senjata api yang dimiliki oleh masyarakat sipil harus didaftarkan di Kepolisian daerah, tempat orang tersebut berdomisili. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa yang bukan anggota TNI atau POLRI yang memiliki senjata api harus mempunyai surat izin dari kepolisian. Hal yang demikian telah diatur didalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1948 yang berbunyi : "setiap orang yang bukan anggota tentara atau Polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kapolri".

Sedangkan surat izin yang dimaksud merupakan kewenangan dari

Kapolri sebagaimana terdapat dalam pasal 9 ayat (3) UU No 8 Tahun 1948 yang berbunyi : "yang berhak memberikan surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian karesidenan atau orang yang ditunjuknya".

2. Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951

Ketentuan UU Darurat No 12 Tahun 1951 pada dasarnya mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara. Melalui peraturan ini pula ditetapkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) peraturan ini berbunyi : "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun."

Peraturan ini bisanya digunakan untuk kasus-kasus penyalahgunaan senjata api, maupun kasus penyelundupan senjata api ke Indonesia. Sebab UU Darurat No 8 Tahun 1951 ini merupakan perundang-undangan yang masih berlaku dan belum dicabut, di dalamnya juga mengatur secara khusus mengenai sanksi penyalahgunaan senjata api.

3. Surat keputusan Kapolri : Skep/82/II/2004

Surat keputusan ini ialah tentang petunjuk pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI dimana dalam buku petunjuk ini ditetapkan sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI yang dimiliki oleh instansi pemerintah, badan usaha swasta, ataupun perorangan, baik untuk kepentingan olahraga, bela diri, maupun untuk kepentingan kelengkapan tugas bagi anggota Satpam/Polsus.

Kewenangan untuk membuat surat keputusan Kapolri di dalam UU No 20 Tahun 1960. Peraturan perundangan ini memberikan wewenang kepada Kapolri sebagai pihak yang dapat mengabulkan atau menolak suatu permohonan izin senjata api. Surat keputusan Kapolri berperan dalam mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai senjata api meskipun sudah diatur secara konkret dalam Undang-Undang perlu adanya pengaturan mengenai hal-hal yang bersifat teknis. Selanjutnya dibuat surat keputusan Kapolri : Skep 82/II/2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, yang di dalamnya mengatur lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemilikan senjata api.

Maksud dari dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi kepolisain untuk melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api, yang berhubungan dengan kewenangan Kapolri untuk mengabulkan izin kepemilikan senjata api.

Surat keputusan Kapolri pada dasarnya mengatur mengenai tahapan yang harus dilalui pemohon izin senjata api yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuat pimpinanya dalam hal ini Kapolri. Dalam pelaksanaannya, surat keputusan ini mengikat masyarakat yang hendak mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api. Sedangkan apabila terjadi suatu pelanggaran atas pemilikan izin tersebut, sanksi yang dapat dijatuhkan tetap merujuk pada UU Drt No 12 Tahun 1951.

4. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012

Peraturan Kapolri ini ialah tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga dimana dalam peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga yang dimiliki oleh pengguna senjata api olahraga khusus hanya untuk tujuan olahraga.

Peraturan Kapolri pada dasarnya mengatur mengenai tahapan yang harus dilalui pemohon izin senjata api olahraga untuk memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuat pimpinanya dalam hal ini Kapolri. Dalam pelaksanaannya, peraturan Kapolri ini mengikat

masyarakat yang hendak mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api olahraga.

Terkait tindakan yang dilakukan apabila ditemukan penyalahgunaan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012, pasal 37 ayat (6), yang berbunyi : mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan senjata api apabila:

- a) Izin kepemilikannya sudah mati/tidak diperbarui/tidak didaftarkan ulang setiap tahunnya di Polda setempat; dan
- b) Terbukti melakukan penyalahgunaan izin.

Sanksi administratif yang bisa diberikan oleh aparat kepolisian berdasarkan peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 berdasarkan pasal 6 diatas serta bentuk dari perbutan penyalahgunaan perizinan airsoft gun dapat dilihat pada pasal 14 ayat (1).

2. Kajian Umum tentang Masyarakat Sipil

2.1. Pengertian Masyarakat Sipil

Pengertian Masyarakat Sipil (*Civil Society*) Masyarakat sipil (*Civil Society*) adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering di perbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari *civil society* sendiri bermacam-macam dan bervariasi. *Civil society* dalam bahasa Indonesia mengandung banyak istilah dimana istilah yang satu dengan lainnya hampir sama. Istilah-istilah tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang berbeda seperti Masyarakat Sipil (Mansour Fakhri), Masyarakat Kewargaan (Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid), Masyarakat sipil (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M. Dawam Rahardjo).¹⁶

Sedangkan dalam bahasa asing, *civil society* disebutkan ke dalam beberapa istilah seperti *Koinonia Politike* (Aristoteles), *Societas Civilis* (Cicero), *Comonitas Politica*, dan *Societe Civile* (Tocquivile), *Civitas Etat* (Adam Ferguson). Konsep *civil society* ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Konsep masyarakat sipil atau *civil society* ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat¹⁷. Yakni

¹⁶ Mochamad Parmudi, **Kebangkitan Civil Society Di Indonesia**, Fisp UIN Walisongo, Jurnal atTaqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015. Hal. 298

¹⁷ Suwarni, **Pendidikan Kewarganegaraan**, Jakarta, Arya Duta, 2011, Hal. 55.

muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern.

Masyarakat Sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris *Civil Society* yang mengambil dari bahasa Latin *civilis societas*. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat sipil¹⁸.

Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

Makna lain bagi istilah civil society yaitu adanya penekanan pada ruang (*space*) yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Di dalam ruang tersebut masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu ada juga yang memahami *civil society* sebagai sebuah asosiasi masyarakat yang beradab dan sukarela hidup dalam suatu tatanan sosial dimana terjadi mobilitas yang tinggi dan kerja sama antar seluruh elemen masyarakat¹⁹.

Ernest Gellner mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat sipil ini sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai *Non Government Organization* (NGO) yang bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penetral kekuasaan negara. Mereka tidak tersentuh hierarki politik, ekonomi, ideologi yang tidak menoleransi adanya kompetisi, bervisi plural dalam memaknai kebenaran dan menentukan parameter kebenaran secara bersama-sama. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai pencipta dan penjaga perdamaian diantar berbagai kepentingan.

Sementara itu, Nurcholis Madjid menekankan istilah Civil society sebagai masyarakat sipil yang berasal dari kata madinah, dalam istilah yang modern

¹⁸ Mochamad Parmudi, Op.cit. Hal. 302

¹⁹ Suryanto, **Pengantar Ilmu Politik**, Bandung, Pustaka Setia, 2018, Hal. 125.

mengarah pada semangat dan pengertian Civil society yang berarti masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab, dan teratur yang terbentuk dalam negara yang baik. Di dalam negara ini terdapat kedaulatan rakyat sebagai prinsip kemanusiaan dan musyawarah, terdapat partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses menentukan kehidupan bersama di bidang politik.

Dalam buku Pengantar Ilmu Politik (Suryanto : 2018), dijelaskan bahwa Civil society sebagai proyek peradaban dan pembangunan dapat direalisasikan terutama oleh tiga agen utama. Pertama, golongan intelektual atau mahasiswa sebagai pengubah pada aspek sosial politik, melalui berbagai ide, inovatif dan kreatif mereka. Kedua, golongan kelas menengah yang akan diposisikan sebagai modal kekayaan demokratisasi dalam sebuah negara. ketiga, golongan arus bawah, mereka lah yang kelak menjadi sumber kekuatan, sekaligus sasaran dan tujuan pemberdayaan politik. Selain itu dibutuhkan adanya organisasi sosial politik sebagai sebuah wadah kelompok kepentingan dengan kemandirian yang tinggi, dibutuhkan juga public sphere atau ruang gerak yang memadai untuk rakyat agar memiliki akses pada lembaga-lembaga administrasi negara, lembaga peradilan dan perwakilan ataupun NGO²⁰.

Dapat dikatakan bahwa civil society merupakan suatu ruang (*space*) yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Oleh karena itu, *civil society* merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan sosial yang ada dan bersifat independen terhadap Negara. Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa *civil society* berwujud kedalam berbagai organisasi yang dibuat masyarakat secara otonom diluar pengaruh negara. Eksistensi organisasi-organisasi ini memberikan peluang bagi adanya ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Wujud lain dari *civil society* ini seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya²¹.

²⁰ Ibid. hal 129

²¹ Ibid.

2.2. Ciri-ciri Masyarakat Sipil

Secara umum ciri-ciri yang dimiliki oleh *civil society* yaitu seperti hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum serta terbuka dan transparan. Dari keseluruhan ciri-ciri tersebut, setidaknya terdapat lima point penting dalam *civil society*, yaitu sebagai berikut :

- a. Partisipasi rakyat, Rakyat dalam sebuah masyarakat sipil tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri.
- b. Otonom, Masyarakat sipil atau masyarakat sipil diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreatifitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku.
- c. Tidak bebas nilai, Masyarakat sipil sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebijakan dan menghasilkan dampak positif yang dirinya (masyarakat) secara umum.
- d. Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih yang positif. Masyarakat sipil harus meletakkan permasalahan di atas perbedaan sehingga tidak ditemui pertikaian antar kelompok yang berbau SARA.
- e. Terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat.

Adapun ciri dari masyarakat sipil sebagai sebuah komunitas yaitu selalu memposisikan dirinya di atas keluarga dan dibawah negara. Bentuk lain dari masyarakat sipil dapat kita lihat ke dalam kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang disebut dengan organisasi masyarakat sipil (ormas) atau juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Organisasi-organisasi tersebut memiliki ciri antara lain : mandiri dalam hal pendanaan (tidak bergantung kepada negara), swadaya dalam kegiatannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya di lingkungannya, bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak di bidang sosial, tidak terlibat dalam persaingan politik untuk merebut kekuasaan, bersifat inklusif (melengkapi beragam kelompok) dan menghargai keragaman.

2.3. Elemen-Elemen Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Elemen-elemen masyarakat sipil merupakan perwujudan dari civil society itu sendiri. Elemen-elemen ini merupakan pilar penegak dari masyarakat sipil yang tergabung dalam institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik.

a. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat -disingkat LSM- adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil (*Civil Society*) yang termasuk dalam kategori *Non Government Organization* (NGO), yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi. LSM didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan skala lokal maupun internasional, dan bertujuan dengan mengangkat kesejahteraan masyarakat. LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan atau 16 kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanannya kepada masyarakat. LSM berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara.

LSM juga dapat berperan sebagai media analisis dan konsultasi bagi warga atau anggotanya terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, sosial

atau politik serta berperan sebagai pemberi peringatan dini kepada pemerintah jika ada indikasi penyelewengan kekuasaan. Baik itu dalam pembuatan kebijakan atau pada saat kebijakan telah di implementasikan²². LSM sebagai kepanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah mampu memberikan fungsi kontrol yang baik dengan memberikan masukan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*).

b. Pers dan Media Massa

Pers dan media massa merupakan salah satu institusi yang menjadi bagian dari social control. Pers dan media massa mampu menyediakan informasi kepada masyarakat secara cepat, khususnya terkait dengan informasi kebijakan pemerintah. Pers juga menjadi salah satu sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat. Bagi pemerintah, pers akan melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah di lakukan, sehingga pemerintah akan berupaya melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan bagi masyarakat, pers akan memberikan informasi, pendidikan dan wawasan yang diperlukan sehingga akan menjadi umpan balik bagi pemerintah mengoreksi dirinya demi kemajuan²³.

c. Supremasi Hukum

Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah satu pilar penegaknya masyarakat sipil, karena salah satu ciri dari masyarakat sipil adalah keadilan sosial. Supremasi hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu ataupun kelompok. Dengan adanya supremasi hukum maka memberikan jaminan terciptanya keadilan. Dalam supremasi hukum juga keadilan harus ditegakkan secara netral, yakni setiap warga negara harus

²² Haniah Haniffe dan Ana Sabhana Azmy, **Kekuatan-kekuatan Politik**, Depok Rajawali Pers, 2018, hal. 38.

²³ Ibid. hal 78.

tunduk pada aturan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

d. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang mampu menciptakan aktivis-aktivis ataupun pemuda-pemudi golongan intelektual. Perguruan tinggi mempunyai perannya tersendiri sebagai *agent of social control* melalui mahasiswanya. Dengan kemampuan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa dan juga berstatus sebagai *agent of change* diharapkan mampu memberikan masukan dan juga kritik terhadap pemerintah dalam upaya mendorong pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

e. Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah kendaraan politik dimana dalam elemen masyarakat sipil mempunyai kontrol sosial sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Partai politik mempunyai fungsi sebagai wadah pengartikulasian dan pengagregasian kepentingan masyarakat. Selain itu, partai politik adalah salah satu struktur politik yang berada di posisi input dan sangat berperan dalam menggerakkan sistem politik²⁴. Partai politik menjadi salah satu pilar penegak masyarakat sipil karena partai politik sendiri merupakan kendaraan untuk menduduki kursi parlemen dengan bersaing melalui pemilu. Di kursi parlemen inilah partai-partai kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakatnya.

3. Kajian Umum Tentang Hukum Positif Indonesia

3.1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁵

²⁴ *ibid.*, hal. 48

²⁵ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal. 56

Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

3.2. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.²⁶ Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:²⁷

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undan-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.

Sumber hukum formil menjadi determinan formil membentuk hukum (formeel determinanten van de rechtsvorming), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber hukum materiil membentuk hukum (materiele determinanten van de rechtsvorming), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah:

a. Undang-Undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundangundangan dan sebagainya.

Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yaitu Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

²⁷ Budi Ruhiatudin, **Pengantar Ilmu Hukum**, Teras, Yogyakarta, 2009, hal. 29-30.

material. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut Undang-undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-undang berisi konsideran dan dictum (amar putusan). Sementara dari cara pembuatannya, Undang-undang adalah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat [1] jo. Pasal 20 ayat [1]).

Undang-undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya disebut Undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya.

Sumber hukum ini, demikian pula ketentuan hukumnya dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan para wakil masyarakat dengan mengingat kepentingan hidup bersama bagi seluruh anggotanya dalam lebensraum atau ruang kehidupan yang tertib, aman dan penuh kedamaian.

b. Adat dan Kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *jus scriptum*.²⁸ Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, kebiasaan dan adat tidak sama. Untuk itu selanjutnya dijelaskan di bawah ini mengenai perbedaan kebiasaan dan adat.

Utrecht membedakan hukum adat dan kebiasaan sebagai berikut:²⁹

- 1) Hukum adat asal usulnya bersifat sakral. Hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal. 108

²⁹ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 2013

Sedangkan kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk lingkungan perundang-undangan, bagian besarnya dalam kontra antara bagian barat dan timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat diresepsi dalam hukum Indonesia nasional yang asli.

- 2) Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis.

c. Traktat

Traktat merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu:

- 1) Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja.
- 2) Traktat Multilateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- 3) Traktat Kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.

Menurut pendapat klasik ada empat tingkatan untuk terjadinya suatu traktat, yaitu:

- a) Penetapan
- b) Persetujuan DPR
- c) Ratifikasi kepala negara
- d) Pengumuman

Melalui penetapan dimaksudkan sebagai konsep persetujuan yang telah dicapai bersama-sama oleh masing-masing utusan. Lalu konsep itu diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Jika dewan telah menyetujui maka dimintakanlah pengesahan (retifikasi) kepala negara, yang jika itu sudah diberikan, lalu diumumkanlah berlakunya perjanjian tersebut.

Akibat dari perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan "Pakta Servanda" artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang

mengadakan perjanjian. Disamping itu para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang mereka buat.³⁰

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudencia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerdeid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata "*yurisprudencia*" dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan.

Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum (*algemeene rechtsleer: General theory of law*), sedangkan untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah *case law* atau *judge Made Law*.

Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.³¹

Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan putusan lain, sebab-sebabnya ialah:

1. Perimbangan Psikologis

Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum, terutama keputusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.

2. Pertimbangan Praktis

Karena dalam kasus yang sama sudah pernah di jatuhkan putusan oleh hakim terdahulu, lebih-lebih apabila putusan itu sudah di benarkan atau di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA) maka lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama.

3. Pendapat yang sama

Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim yang lebih dulu, terutama apabila isi dan

³⁰ Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hal. 171

³¹ *Ibid.*, hal. 159-160

tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian, maka wajar apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan. Sedangkan dasar hukum yurisprudensi ialah:

- 1) Dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum.
- 2) Adanya kekurangan daripada hukum yang ada, karena pembuat Undang undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka yurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang.³²

e. Doktrin

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formil.³³

Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan kekuasaannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi untuk dapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim.

Selanjutnya yang termasuk dalam sumber hukum materiil adalah terdiri dari:

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
- b. Agama
- c. Kebiasaan
- d. Politik hukum daripada pemerintah³⁴

3.3. Unsur, Ciri-ciri, dan Sifat Hukum Positif

Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

³² *Ibid.*, hal. 161-164

³³ E. Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 2013

³⁴ B. S. Pramono, **Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum**, Usaha Nasional, Surabaya, 2006, hal.

b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

c. Peraturan bersifat memaksa.

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.³⁵

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Terdapat perintah/larangan.

b. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.³⁶

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan "kaedah hukum".³⁷ Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.³⁸

Sanksi hukum atau pidana memiliki beragam jenis bentuk. Namun, sesuai dengan Bab II (PIDANA), Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

a. Pidana pokok, meliputi:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

b. Pidana tambahan, meliputi:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan Hakim

Sedangkan sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Hukum positif merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa

³⁵ Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 39

³⁶ *Ibid*, hal 40

³⁷ *Ibid*, hal 40

³⁸ *Ibid*, hal 41

orang (*person*) agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum dapat ditaati. Karena tidak setiap orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum tersebut.³⁹

3.4. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.

³⁹ Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 40

- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.⁴⁰

Soleman B. Taneko, seorang pakar hukum mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis.⁴¹ Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan adalah meliputi:

- a. Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b. Pengawasan/pengendalian sosial (*sosial control*).
- c. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- d. Rekayasa sosial (*sosial engineering*).

4. Kajian Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asa legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasar kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁴²

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak

⁴⁰ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

⁴¹ <https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/fungsi-hukum-menurut-pakar/> diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 21.42

⁴² Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁴³

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipanjang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁴⁴

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu :

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

⁴³ Moeljatno, Op. Cit, hlm. 46.

⁴⁴ Ibid, hlm.48.

2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijakan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/cara melakukan perbuatan.⁴⁵

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan yang melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.⁴⁷

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana". Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat

⁴⁵ Ibid, hlm. 48.

⁴⁶ Moeljatno, Op. Cit, hlm. 49.

⁴⁷ Ibid, hlm. 50.

dikenakan. Apabila hakim menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu :

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berupa akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana

⁴⁸ Ibid, hlm.51.

dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan "perbuatan" sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. Banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, didalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntu ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, bagaimana konsepsi ini diterapkan dalam praktik hukum perlu pengkajian lebih lanjut.

Pertanggungjawaban pidana terutama dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, pengkajian mengenai teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pertama-tama dilakukan dengan menelusuri penerapan dan perkembangannya dalam putusan pengadilan. Dengan kata lain, konkretisasi sesungguhnya dari penerapan dari teori tersebut terdapat dalam putusan pengadilan. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan.

Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan psikologis. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin daripada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu

apakah dinilai ada atau tidak ada kesalahan sebagai hal yang memberatkan dan meringankan pidana.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelemahan pengaturan izin pemakaian senjata api oleh masyarakat sipil dalam hukum positif Indonesia

Senjata api merupakan salah satu karya cipta manusia yang terus mengalami perkembangan selama ribuan tahun. Kegunaan senjata api turut mengalami perkembangan seiring dengan peradaban manusia yang terus mengikuti perkembangan zaman.

Awalnya, senjata api hanya dipergunakan untuk kepentingan berperang, akan tetapi kemudian juga dipergunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya sebagai salah satu alat atau instrumen utama dalam pembangunan pertahanan melalui penyediaan kelengkapan sarana persenjataan bagi angkatan bersenjata suatu negara, sebagai sarana untuk mendukung tugas-tugas aparat keamanan dalam melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan/polisi khusus, sebagai sarana untuk kepentingan olahraga dan kepentingan pembelaan diri.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan penggunaannya, senjata api saat ini menjadi salah satu komoditas perdagangan yang harganya tinggi dan telah diperdagangkan baik di dalam negeri maupun antara satu dan/atau beberapa negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam realitanya sebagai salah satu komoditas perdagangan yang harganya tinggi, senjata api tidak hanya kita temui penggunaannya oleh TNI/POLRI namun juga kita temui penggunaannya oleh masyarakat sipil. Masyarakat sipil dalam kepemilikan senjata api memiliki berbagai alasan dalam kepemilikannya yang paling umum adalah upaya perlindungan diri.

Dalam perkembangannya penggunaan senjata api diperbolehkan kepemilikan dan penggunaannya bukan hanya bagi TNI/Polri namun juga bagi masyarakat sipil dengan tetap mendapatkan izin yang diajukan kepada Kepala Kepolisian atau yang telah ditunjuk sesuai dengan beberapa peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Darurat Nomor 12

Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Perppu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api.

Lebih terperinci, berbagai peraturan yang mengatur mengenai penggunaan dan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam beberapa aturan, yaitu :

1. UU Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
 - a. Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

"Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya."

Dalam pasal ini, dapat dikaji bahwasanya maksud dari pasal ini semua masyarakat sipil bukan TNI/Polri tidak memiliki hak secara bebas dalam memiliki senjata api. Mereka akan diberikan izin pemakaian atas senjata api yang ada di tangan mereka jika mendaftarkan senjata api yang berada ditangannya tersebut kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau petugas setingkat yang memang diberikan mandat dalam mengurus pendaftaran senjata api yang dimilikinya agar legal dalam menggunakan senjata api yang berada dalam kuasanya tersebut.

Dalam proses perdaftarannya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat sipil yaitu dalam hal untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sipil berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 tahun 2008 yaitu harus memenuhi syarat medis dan psikologis, lulus uji psikotes, lulus uji kelayakan, belum pernah melakukan tindak pidana, berusia 21 - 65 tahun dan telah memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA). Syarat medis dan psikologis yang dimaksud disini adalah tes medis dan psikologis mengenai mental, kejiwaan dan kebijakan si pengaju kepemilikan senjata api yang nantinya hasil daripada tes medis, psikologis dan psikotes yang yang dikeluarkan oleh Psikolog POLRI akan dijadikan salah satu syarat dalam

kepemilikan senjata api. Uji kelayakan yang dimaksud disini adalah berupa keahlian si pengaju kepemilikan dalam menembak dan membidik target yang dapat dilakukan di Polda setempat. Kemudian keterangan belum pernah melakukan tindak pidana dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polda setempat.

Dalam aturannya, Mabes Polri juga menentukan pengaju juga harus memenuhi syarat administratif dengan total biaya Rp 5 juta untuk tes psikologi Rp 1 juta, tes kesehatan Rp 1 Juta, tes kelayakan uji menembak Rp 1 juta, uji balistik Rp 600 ribu dan pendaftaran Rp 800 ribu.⁴⁹ Pengaju kepemilikan senjata api harus memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA) dengan mendapatkannya setelah melalui tiga tahap uji kepemilikan yakni tes kesehatan fisik, tes psikologi dan tes kelayakan.

Untuk memperoleh IKHSA Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ke Dir Intelkam POLDA dilengkapi dengan daftar riwayat hidup, SKCK beserta isian sidik jari, foto copy KTP/KTA, foto copy SIUP dan Skep jabatan bagi pejabat Bank, foto copy skep jabatan bagi Pejabat pemerintah dan anggota POLRI, Pas Photo berwarna ukuran 2x3, 4x6 sebanyak 4 lembar, Surat keterangan Dokter dan memiliki keterampilan menembak minim kelas III. Kemudian Dir Intelkam memerintahkan anggotanya untuk cek lapangan (kebenaran alamat dan kegiatan usahanya), kemudian mengadakan screening/wawancara terhadap pemohon. Apabila semua syarat terpenuhi maka akan dikeluarkan rekomendasi. Langkah Selanjutnya pemohon mengajukan permohonan ijin ke Dir Intelkam POLRI dilengkapi dengan rekomendasi Kapolda, SKCK, Daftar riwayat hidup, foto copy: KTP/KTA/SIUP/Skep Jabatan, Pas photo ukuran 2x3, 4x6 sebanyak 4 lembar serta sertifikat menembak. Setelah itu Dir INTELKAM memerintahkan Kst Pam Wassendak untuk mengadakan penelitian permohonan, mengadakan cek kelayakan usaha & integritas. Lingkungan mengajukan utuk test psikologi, rikes jiwa & ujian menembak bila memenuhi syarat makan akan dibuat konsep/ijin.

⁴⁹ Tempo.Co, Pemilik Senjata Api Harys Miliki Izin Kepemilikan Senjata Api, diakses dari Tempo.Co pada 11 Maret 2021 pukul 10.07 WIB

Setelah semua terpenuhi maka IKHSA jadi dan enggunaan ijin akan ditanda tangani KAPOLRI.

Setelah memenuhi persyaratan di atas, pemohon yang merupakan masyarakat sipil, harus menempuh prosedur baku yang telah ditetapkan oleh Perkap Nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri dengan tahapan prosedur tersebut adalah pengajuan rekomendasi dari Polda, dan rekomendasi tersebut juga harus dilengkapi dengan bukti kelulusan tes psikologi, kesehatan, kesehatan fisik, bakat, dan keahlian di Mabes Polri untuk mendapatkan sertifikasi lulus kualifikasi untuk mendapatkan izin memakai senjata.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 82/II/2004, tidak semua pihak sipil dapat mengajukan hak untuk memiliki senjata api. Pihak yang dapat mengajukan izin pemakaian senjata adalah: pejabat swasta atau perbankan dalam jabatan tertentu; jajaran pemerintahan, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR RI, Sekjen/Irjen/Dirjen; Sekretaris Kabinet; demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Walikota/ Bupati, dan pegawai instansi pemerintah golongan IV-b; Purnawirawan TNI/Polri, yakni Perwira Tinggi dan Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya berpangkat Mayor/Kompol. Sedangkan kelompok profesi tertentu, yakni pengacara senior dengan SKEP Menteri Kehakiman/Peradilan dan dokter praktik dengan SKEP Menkes atau Kemenkes. Perlu diketahui dalam perkembangannya bahwa berdasarkan Pasal 10 Perkap Nomor 18 Tahun 2015 senjata api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara. Kepemilikan senjata api atau senpi bagi warga sipil memang diperbolehkan, namun dengan perizinan yang sangat ketat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Izin kepemilikan senjata api di Indonesia oleh warga sipil dikeluarkan salah satunya untuk pertahanan diri hingga aktivitas olahraga. Warga sipil tidak boleh menggunakan senpi jika tidak dibutuhkan. Selain itu, senpi yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan di depan umum apalagi untuk menakut-nakuti orang lain.

b. Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6 ayat 1 :

"Senjata api sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 didaftarkan pada tempat yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara."

Pasal 6 ayat 2 :

"Tiap-tiap senjata api yang akan didaftarkan menurut ayat 1 harus dibawa ketempat pendaftaran untuk diperlihatkan kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya."

Pada kedua ayat ini dapat dikaji bahwasanya pendaftaran senjata api oleh masyarakat sipil bukan TNI/Polri dilakukan pada tempat yang telah diatur dan ditentukan oleh Kepolisian Negara dan ditangani oleh petugas yang telah ditunjuk khusus untuk menangani proses pendaftaran senjata api dengan membawa segala persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pendaftarannya pun masyarakat sipil yang berkepentingan diharuskan pula selain membawa syarat yang diatur oleh undang-undang juga membawa senjata api yang hendak didaftarkan guna diperlihatkan wujud dan jenisnya kepada petugas untuk keperluan verifikasi.

c. Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7 ayat 1 :

"Mereka yang mendaftarkan senjata apinya menerima tanda pendaftaran menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara"

Pasal 7 ayat 2 :

"Tanda pendaftaran untuk senjata-senjata api yang didaftarkan menurut pasal 6 ayat 1, berlaku sebagai surat idzin pemakaian senjata api untuk sementara waktu, selanjutnya disebut surat idzin sementara."

Pada kedua ayat ini dapat dikaji bahwasanya warga negara yang telah mendaftarkan senjata api yang sedang dalam genggamannya, akan mendapatkan tanda pendaftaran dari petugas yang ditunjuk dan menjadi surat izin pemakaian senjata api. Surat izin ini selanjutnya menjadi syarat mutlak setiap warga negara dalam menggunakan atau pun memiliki senjata api.

2. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/82/II/2004

Dalam proses perdaftarannya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat sipil yaitu dalam hal untuk memperoleh izin pemakaian senjata api, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sipil berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/82/II/2004, yaitu harus memenuhi syarat medis dan psikologis, lulus uji psikotes, lulus uji kelayakan, belum pernah melakukan tindak pidana, berusia 21 - 65 tahun dan telah memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA). Syarat medis dan psikologis yang dimaksud disini adalah tes medis dan psikologis mengenai mental, kejiwaan dan kebijakan si pengaju kepemilikan senjata api yang nantinya hasil daripada tes medis, psikologis dan psikotes yang dikeluarkan oleh Psikolog POLRI akan dijadikan salah satu syarat dalam kepemilikan senjata api. Uji kelayakan yang dimaksud disini adalah berupa keahlian si pengaju kepemilikan dalam menembak dan membidik target yang dapat dilakukan di Polda setempat. Kemudian keterangan belum pernah melakukan tindak pidana dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polda setempat. Dalam aturannya, Mabes Polri juga menentukan pengaju juga harus memenuhi syarat administratif dengan total biaya Rp 5 juta untuk tes psikologi Rp 1 juta, tes kesehatan Rp 1 Juta, tes kelayakan uji menembak Rp 1 juta, uji balistik Rp 600 ribu dan pendaftaran Rp 800 ribu.⁵⁰ Pengaju kepemilikan senjata api harus memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA) dengan mendapatkannya setelah melalui tiga tahap uji kepemilikan yakni tes kesehatan fisik, tes psikologi dan tes kelayakan.

Untuk memperoleh IKHSA Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ke Dir Intelkam POLDA dilengkapi dengan daftar riwayat hidup, SKCK beserta isian sidik jari, foto copy KTP/KTA, foto copy SIUP dan Skep jabatan bagi pejabat Bank, foto copy skep jabatan bagi Pejabat pemerintah dan anggota POLRI, Pas Photo berwarna ukuran 2×3, 4×6 sebanyak 4 lembar, Surat keterangan Dokter dan memiliki keterampilan

⁵⁰ Tempo.Co, Pemilik Senjata Api Harys Miliki Izin Kepemilikan Senjata Api, diakses dari Tempo.Co pada 11 Maret 2021 pukul 10.07 WIB

menembak minim kelas III. Kemudian Dir Intelkam memerintahkan anggotanya untuk cek lapangan (kebenaran alamat dan kegiatan usahanya), kemudian mengadakan screening/wawancara terhadap pemohon. Apabila semua syarat terpenuhi maka akan dikeluarkan rekomendasi. Langkah Selanjutnya pemohon mengajukan permohonan ijin ke Dir Intelkam POLRI dilengkapi dengan rekomendasi Kapolda, SKCK, Daftar riwayat hidup, foto copy: KTP/KTA/SIUP/Skep Jabatan, Pas photo ukuran 2x3, 4x6 sebanyak 4 lembar serta sertifikat menembak. Setelah itu Dir INTELKAM memerintahkan Kst Pam Wassendak untuk mengadakan penelitian permohonan, mengadakan cek kelayakan usaha & integritas. Lingkungan mengajukan untuk test psikologi, rikes jiwa & ujian menembak bila memenuhi syarat maka akan dibuat konsep/ijin. Setelah semua terpenuhi maka IKHSA jadi dan penggunaan ijin akan ditanda tangani KAPOLRI.

3. Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri

Pemohon izin kepemilikan dan penggunaan/ pemakai senjata api yang merupakan masyarakat sipil dalam prosesnya harus menempuh prosedur baku yang telah ditetapkan oleh Perkap Nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri dengan tahapan prosedur tersebut adalah pengajuan rekomendasi dari Polda, dan rekomendasi tersebut juga harus dilengkapi dengan bukti kelulusan tes psikologi, kesehatan, kesehatan fisik, bakat, dan keahlian di Mabes Polri untuk mendapatkan sertifikasi lulus kualifikasi untuk mendapatkan izin memiliki senjata. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 82/II/2004, tidak semua pihak sipil dapat mengajukan hak untuk memiliki dan memakai senjata api. Pihak yang dapat mengajukan izin kepemilikan pemakai senjata adalah: pejabat swasta atau perbankan dalam jabatan tertentu; jajaran pemerintahan, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR RI, Sekjen/Irjen/Dirjen; Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Walikota/

Bupati, dan pegawai instansi pemerintah golongan IV-b; Purnawirawan TNI/Polri, yakni Perwira Tinggi dan Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya berpangkat Mayor/Kompol. Sedangkan kelompok profesi tertentu, yakni pengacara senior dengan SKEP Menteri Kehakiman/Peradilan dan dokter praktik dengan SKEP Menkes atau Kemenkes. Perlu diketahui dalam perkembangannya bahwa berdasarkan Pasal 10 Perkap Nomor 18 Tahun 2015 senjata api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara. Kepemilikan senjata api atau senpi bagi warga sipil memang diperbolehkan, namun dengan perizinan yang sangat ketat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Izin kepemilikan senjata api di Indonesia oleh warga sipil dikeluarkan salah satunya untuk pertahanan diri hingga aktivitas olahraga. Warga sipil tidak boleh menggunakan senpi jika tidak dibutuhkan. Selain itu, senpi yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan di depan umum apalagi untuk menakut-nakuti orang lain.

4. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17)

Ayat (1) :

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata api, bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun."

Dalam undang-undang ini, ditekankan bentuk-bentuk penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh per-orangan tanpa hak kepemilikan dan penggunaan akan dijatuhkan sanksi oleh negara.

Bentuk-bentuk penyalahgunaannya disebutkan dalam pasal :

Pasal 1 ayat (1) :

"Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun

Dalam penjelasannya, harus ada unsur subjek berupa "barangsiapa" yang merujuk pada seseorang atau beberapa orang dengan perbuatan membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan senjata api, amunisi atau bahan peledak tanpa izin dengan pidana hukuman mati atau penjara barulah bisa dikatakan suatu penyalahgunaan.

Pasal 2 ayat (1) :

"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun."

Dalam penjelasannya, harus ada unsur subjek berupa "barangsiapa" yang merujuk pada seseorang atau beberapa orang dengan perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin dengan ancaman pidana maksimal sepuluh tahun maka barulah bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan senjata api.

Dalam kedua pasal ini, perbuatan-perbuatan yang disebutkan diatas dapat dihukum Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan sesuai dengan Pasal 3.

5. Perppu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api

Pasal 1 :

"Kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perijinan menurut Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en lossing) dan B (bezit-, handel en vervoer) 1939, Ordonnantie tanggal 19 Maret 1937 (Staatsblad 1937 No. 170), sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad 1939 No. 278) dan Vuurwapenuitvoerings-voorschriften (invoer, uitvoer, doorvoer en lossing, bezit-, handel en vervoer) 1939, Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad 1939 No. 279), diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri".

Aturan ini semakin menguatkan makna dari aturan sebelumnya (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1948) bahwa yang diberikan hak dalam mengatur pendaftaran senjata milik masyarakat sipil dan Polri adalah Kepolisian Negara.

Mengacu kepada beberapa peraturan yang disebutkan diatas yang berkaitan dengan senjata api, maka dapat dipahami bahwa izin pemakaian senjata api memang diatur secara terbatas. Di lingkungan masyarakat sipil terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Bagi masyarakat sipil yang memiliki dan memakai senjata api harus melalui proses pendafataran. Kemudian bagi warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya.

Dari peraturan yang disebutkan di atas, juga dapat dipahami bahwa terdapat cakupan yang luas mengenai izin pemakaian senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana.

Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan dan pemakaian.

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan terdapat beberapa kriteria pembatasan kepemilikan dan pemakaian senjata api yaitu :

- a. Kepemilikan dan pemakaian senjata api hanya untuk TNI/POLRI dan masyarakat sipil dalam kategori tertentu
- b. Izin kepemilikan dan pemakaian senjata api harus melalui syarat-syarat yang telah disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1948

Berdasarkan SKEP Kapolri No. 82/ II/2004, tidak semua pihak sipil dapat mengajukan hak untuk memiliki senjata api. Pihak yang dapat mengajukan izin kepemilikan senjata adalah pejabat swasta atau perbankan dalam jabatan tertentu serta kelompok profesi tertentu.

Sejatinnya diberlakukan batasan pihak yang dapat mengajukan izin kepemilikan senjata api adalah untuk mencegah adanya penyalahgunaan senjata api. Namun menurut penulis, dari peraturan diatas terdapat kelemahan yaitu pada pihak-pihak yang diperbolehkan memiliki senjata api dikarenakan menurut penulis sampai dititik mana para pejabat pemerintah dan swasta yang diberi izin kepemilikan senjata api, se-urgent apa pihak pemerintah dan swasta boleh memiliki senjata api. Karena menurut penulis, jika hanya dicantumkan pihak-pihak yang diperbolehkan mengantongi izin kepemilikan senjata api, maka kurang memiliki fungsi yang baik dari kepemilikan senjata api jika tidak dijelaskan alasan mendasar profesi tersebut boleh memiliki izin kepemilikan senjata api.

Dari pihak-pihak tersebut diatas, diberlakukan persyaratan dan kriteria untuk bisa memiliki hak penggunaan senjata api yaitu yang tertera dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/82/II/2004, yaitu harus memenuhi diantara syarat dan kriteria tersebut adalah harus memiliki surat identitas, dinyatakan sehat jasmani dan rohani, terdapat batasan umur, memahami peraturan, dan mendapatkan surat penunjukan oleh pimpinan. Namun dari syarat yang memang harus

dipenuhi oleh masyarakat sipil perihal kondisi medis dan psikologis, kelayakan dan psikotes dalam kepentingannya dalam mendapatkan surat izin penggunaan senjata api, penulis menemukan celah yang menjadi salah satu faktor mengapa tingkat penyalahgunaan senjata api tidak lekas membaik. Yaitu pada saat perpanjangan surat izin penggunaan senjata api yang dikeluarkan oleh Kepolisian.

Dalam pengajuan permohonan perpanjangan surat izin penggunaan senjata api, pemohon hanya perlu melakukan tes kelayakan sebagai syarat mendapatkan izin kembali. Dalam hal ini, menurut penulis kondisi medis dan psikologis dan kelayakan setiap orang dalam setiap bulannya juga pasti akan mengalami perubahan mengingat banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam sebulan yang menyerang kondisi medis dan psikologis serta masih layak atau tidaknya setiap orang memegang izin menggunakan senjata api. Sehingga, bukanlah suatu keefektivitasan apabila menjadikan persyaratan kondisi mental dan psikologis, kelayakan dan psikotes dalam keadaan baik hanya diawal pendaftaran senjata api. Perlunya dilakukan pengecekan ulang disetiap perpanjangan surat izin penggunaan senjata api mengenai tiga (3) faktor tersebut dikarenakan setiap orang yang mendapati celah melakukan kejahatan penyalahgunaan senjata api adalah mereka yang kondisi medis, psikologisnya sedang dalam keadaan yang kurang baik.

Dalam perkembangannya, kini izin pemakaian senjata api diizinkan digunakan oleh seluruh masyarakat sipil melalui Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatannya dan juga untuk keperluan keolahragaan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Dari peraturan keduanya, penulis mencoba mengkaji mengenai tingkat penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Jika dilihat riwayat penyebab penyalahgunaan senjata api di Indonesia, hampir mendekati 70% yang

digunakan adalah alasan untuk membela diri.⁵¹ Penulis berpendapat, terdapat kelemahan dalam aturan ini yaitu dengan hanya dicantumkan batasan usia berapa hingga berapa tahun masyarakat sipil boleh mengajukan pendaftaran surat izin pemakaian senjata api tanpa dikategorikan ke beberapa golongan tidak akan efisien dalam menurunkan angka penyalahgunaan senjata api.

Penyalahgunaan dikatakan sebagai bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran baik sendiri-sendiri atau bersama melakukan atau tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain dengan instrumen alat yang melekat pada dirinya.⁵²

Sedangkan penyalahgunaan senjata api sendiri disini yang penulis maksud adalah penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil yang telah memiliki izin pemkaian senjata api namun menggunakan senjata api tersebut untuk hal-hal yang melanggar hukum. Berbagai bentuk dan jenis penyalahgunaan senjata api diantaranya yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) yaitu ekspor dan impor senjata api tanpa izin serta penggunaan senjata api selain untuk keperluan olahraga dan bela diri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa didalam pengaturan terkait pendaftaran izin kepemilikan dan penggunaan/pemakaian senjata api baik yang ada didalam Undang-undang no 8 tahun 1948 maupun Perkapolri no 18 tahun 2015 belum ada pengaturan secara khusus mengatur terkait pembagian lisensi jenis senjata api, keperluannya, dan usia dari sesseorang yang hendak melakukan pendaftaran izin kepemilikan dan penggunaan/pemakaian senjata api di negara Indonesia ini. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari pengaturan terkait izin pemakaian dan kepemilikan senjata api di negara Republik Indonesia jika dibandingkan dengan pengaturan serupa yang ada di negara Republik

⁵¹ Pusat Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, **Kontroversi Kepemilikan Senjata Api oleh Warga Sipil**, diakses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-10-II-P3DI-Mei-2012-9.pdf, pada Sabtu 20 Februari 2021 pukul 22.09 WIB

⁵² Sari Ratu P, **Penyalahgunaan Senjata Api oleh Kepolisian**, (Palembang: Tujuh Tera), 2012, hal. 03

Ceko. Dimana berdasarkan pasal 16 ayat (2) Undang-undang Tentang Senjata Api dan amunisi Negara Republik Ceko (*Act on Firearms and Ammunition Of Czech Republik*) mereka lebih jelas dalam mengatur terkait izin kepemilikan dan penggunaan/pemakaian senjata api bagi masyarakat sipil di negaranya.

Sebagai contoh perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil adalah perbuatan Dokter Helmi yang menembak mati istrinya, Dokter Letty. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 November 2017 di Jakarta Timur. Alasan Dokter Helmi menembak istrinya karena sang istri tidak ingin diceraikan. Dokter Helmi menembak Dokter Letty sebanyak 6 (enam) kali menggunakan senjata jenis revolver. Setelah membunuh istrinya, Dokter Helmi langsung menyerahkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Dokter Helmi dikenai pasal dalam UU Senjata Api karena dengan izin pemakaian senjata api yang dimilikinya, ia gunakan untuk menembak sang istri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup kepada Dokter Helmi.⁵³ Dalam kasus diatas dapat dianalisa bahwasanya Dr. Helmi melakukan penyalahgunaan senjata api karena telah menembak mati istri dengan menggunakan jenis revolver yang seharusnya kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil hanya diperbolehkan untuk keperluan olahraga dan bela diri. Atas kasus tersebut maka Dokter Helmi sudah sepantasnya mengalami pencabutan izin atas kepemilikan senjata api dan penggunaan senjata api.

⁵³ Ibnu Hariyanto, 'Tembak dr Letty, Dokter Helmi Divonis Penjara Seumur Hidup' (detikNews 2018) <https://news.detik.com/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 12.24

B. Pengaturan izin pemakaian senjata api dalam hukum positif Indonesia dimasa yang akan datang dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat

Penggunaan senjata api dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas atau di bawah izin ketentuan yang berlaku. Awalnya, senjata api hanya dipergunakan untuk kepentingan berperang, akan tetapi kemudian juga dipergunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya sebagai salah satu alat atau instrumen utama dalam pembangunan pertahanan melalui penyediaan kelengkapan sarana persenjataan bagi angkatan bersenjata suatu Negara sebagai sarana untuk mendukung tugas-tugas aparat keamanan dalam melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan/polisi khusus, sarana untuk kepentingan olahraga, dan kepentingan pembelaan diri.

Pada dasarnya setiap orang berhak melindungi diri dan hartanya (*self defense*) dari ancaman pihak lain. Setiap orang juga memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya termasuk dengan cara menguasai (memiliki/menggunakan) senjata api. Atas dasar filosofi hak hidup dan mempertahankan hidup itulah, negara Indonesia membuka kesempatan bagi warga sipil untuk memiliki senjata api dengan melalui syarat dan proses tertentu. Namun dalam penyelenggaraannya masih terlihat kekaburan peraturan yang ada mengenai kepemilikan senjata api yang memiliki beberapa celah kelemahan yang mengarah terbentuknya penyalahgunaan senjata api. Oleh karena nya, diperlukan beberapa perubahan yang bisa dijadikan landasan dan pertimbangan kedepan untuk pengaturan kepemilikan senjata api di Indonesia yang bertujuan kepada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sendiri.

Beberapa celah yang penulis temukan dalam beberapa aturan mengenai senjata api di Indonesia, yaitu mengenai perpanjangan izin pemakaian senjata api dan ketidak-efisienan yang menimbulkan celah penyalahgunaan senjata api dalam perihal batasan usia seseorang untuk dapat mengajukan izin pemakaian senjata api, menurut penulis perlunya perombakan beberapa aturan di pokok

bahasan mengenai perpanjangan izin pemakaian senjata api. Penulis memberikan solusi untuk prosedur dalam mengajukan perpanjangan izin pemakaian senjata api diharuskan melalui tahap pemeriksaan medis dan psikologis, uji kelayakan dan psikotes bagi seluruh yang berkepentingan dalam mengajukan perpanjangan surat izin pemakaian senjata api. Hal itu dimaksudkan untuk menutup salah satu faktor dalam penyalahgunaan senjata api yaitu kondisi mental, psikologis dan kelayakan seseorang dalam menerima kembali izin pemakaian senjata api.

Negara Ceko adalah salah satu negara yang penulis jadikan pembandingan dalam penelitian mengenai negara dengan angka penanganan penyalahgunaan senjata api yang berhasil seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kongres PBB Januari 2020 di Jenewa.⁵⁴ Aturan penggunaan senjata api di Ceko tidak jauh beda seperti di Indonesia, Ceko akan memberikan izin pemakaian senjata api apabila orang tersebut berhasil melewati beberapa tes kelayakan untuk mendapat izin pemakaian dan kepemilikan senjata api. Yang membedakan adalah di Negara Ceko berdasar Undang-Undang Senjata Api Ceko yaitu *Czech Firearms Act Section 16(2)*, dalam aturannya mereka menerapkan konsep lisensi bagi setiap kebutuhan penggunaan senjata api. Mereka menggolongkan penggunaan senjata api dengan batasan usia yang berbeda-beda di setiap golongan. Lisensi untuk keperluan bela diri hanya akan diberikan pada mereka memiliki usia 21 tahun keatas dengan jenis senjata api yang berbeda pula dengan lisensi lain. Di Ceko, terdapat lima (5) jenis lisensi yang digunakan dalam mengeluarkan surat izin pemakaian senjata api yaitu untuk berburu, latihan profesi, olahraga, perlindungan kehidupan kesehatan dan properti, serta koleksi. Dalam setiap lisensi pula akan berbeda jenis senjata api yang boleh digunakan serta waktu penggunaan. Penulis merangkum analisa dari kelima lisensi sebagai berikut :

⁵⁴ Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa, Januari 2020 di Jenewa

Table 2. Tipe lisensi senjata berdasar *Czech Firearms Act*

Tipe lisensi	Usia minimal	Pembatasan amunisi	Catatan
A - Koleksi	21	3 pcs atau 1 paket produksi terkecil dengan tipe, kaliber & merk yang sama	Satu-satunya jenis lisensi dimana senjata api kategori-A dapat diperoleh (tunduk pada pengecualian masalah-mungkin). Dalam kasus kepemilikan senjata api kategori A, pemegang lisensi harus memberikan akses untuk pemeriksaan penyimpanan yang aman kepada petugas polisi.
B - Olahraga	18 (15 untuk anggota klub menembak)	Tidak ada	
C - Berburu	18 (16 untuk siswa di sekolah dengan kurikulum berburu)	Tidak ada	

D - Latihan profesi	21 (18 untuk siswa di sekolah yang mengadakan pendidikan tentang pembuatan senjata api atau amunisi)	Hanya amunisi untuk senjata api yang dimiliki (tidak ada batasan kuantitas).	Tidak boleh memiliki senjata api apa pun (kecuali pemegang juga dari jenis lisensi lain), hanya memiliki & membawa senjata api tersembunyi yang dimiliki oleh pemberi kerja (kategori apa pun). Gendongan terbuka untuk anggota Polisi Kota, keamanan Bank Nasional Ceko saat bertugas
E -Perlindungan kehidupan, kesehatan dan property	21	Hanya amunisi untuk senjata api yang dimiliki (tidak ada batasan kuantitas).	Barang bawaan tersembunyi (hingga 2 senjata siap untuk segera digunakan)
F – Kegiatan Bidang Persenjataan yang Belum Meledak	21	Hanya amunisi untuk senjata api yang dimiliki (tidak ada batasan kuantitas).	

Sumber : Bahan hukum primer, diolah, 2021

Dari tabel diatas, diperoleh enam pembagian tipe lisensi yang berlaku di Negara Ceko dalam hal kepemilikan senjata api. Tipe pertama, tipe lisensi senjata api sebagai koleksi yang dapat dimiliki oleh warga negara sipil dengan usia minimal 21 tahun agar dapat memiliki izin kepemilikan senjata api dengan

pembatasan hanya 3 pcs atau 1 paket produksi senjata api terkecil dengan tipe, kaliber & merk yang sejenis yang diperbolehkan dimiliki sebagai koleksi. Tipe kedua adalah tipe lisensi untuk kepentingan olahraga yang izinnnya dapat dimiliki warga sipil dengan usia minimal 18 tahun dengan pengecualian memperbolehkan warganya usia 15 tahun untuk mendapatkan izin ini hanya untuk keperluan olahraga menembak. Tipe yang ketiga adalah tipe lisensi untuk keperluan berburu yang izinnnya dapat dimiliki apabila usia mencapai 18 tahun dengan pengecualian usia 16 tahun diperbolehkan mendapat izin hanya untuk siswa dengan mendapatkan kurikulum belajar tentang berburu. Tipe keempat adalah tipe lisensi untuk keperluan latihan lisensi yang izinnnya dapat didapat jika berusia 21 tahun dengan pengecualian 18 tahun boleh mendapatkan izin ini hanya untuk siswa yang sekolah tempatnya belajar mengadakan pendidikan tentang pembuatan senjata api atau amunisi. Kemudian tipe kelima adalah tipe lisensi untuk perlindungan kehidupan, kesehatan dan property yang dapat dimiliki izinnnya yang telah berusia minimal 21 tahun. Tipe lisensi terakhir adalah untuk keperluan kegiatan yang dibidang persenjataan yang belum meledak yang izinnnya dapat dimiliki dengan minimal usia 21 tahun. Menurut penulis dengan adanya lisensi seperti diatas yang diterapkan oleh Negara Ceko dapat menata dan memetakan persebaran jenis senjata api berdasar dengan fungsinya yang sesuai dengan umur masyarakatnya agar masyarakat dapat menggunakan senjata api dengan tertata, dengan keperluan yang memang dibutuhkan serta membantu negara pula untuk mengontrol persebaran senjata api.

Berdasarkan pada beberapa kelemahan pada aturan senjata api di Indonesia yang telah penulis temukan, yaitu pada kelemahan pertama ada pada ketidaksesuaian dan target yang pasti mengenai alasan beberapa profesi yang ada di aturan diperbolehkan memiliki izin kepemilikan senjata api. Dalam aturan yang ada tidak dijelaskan mengapa profesi-profesi tersebut diperbolehkan memiliki izin kepemilikan senjata api. Selain karena melindungi dan mengayomi masyarakat adalah tugas dari polisi, hal ini pula justru dapat membuka peluang penyalahgunaan senjata api oleh tataran atas dengan alasan perlindungan diri. Solusi yang penulis tawarkan adalah dihapuskan frasa penggolongan profesi yang diperbolehkan memiliki izin kepemilikan senjata api dan mengganti seluruh masyarakat sipil dapat memiliki izin kepemilikan senjata

api dengan persyaratan yang telah diatur dengan peraturan yang ada tanpa adanya pembatasan profesi namun dengan pemenuhan syarat-syarat yang aturan yang telah ditentukan. Kelemahan kedua yaitu mengenai dicantulkannya batasan usia pada masyarakat sipil mengajukan pendaftaran surat izin kepemilikan dan pemakaian senjata api tanpa dikategorikan ke beberapa golongan ini juga dapat membuka peluang penyalahgunaan senjata api. Solusi dari penulis adalah tetap adanya batasan usia namun dengan penggolongan usia disesuaikan dengan keperluan dan jenis senjata api yang masuk akal untuk dipergunakan oleh masyarakat sipil yaitu dengan penerbitan lisensi batasan umur, senjata dan keperluan terhadap senjata api tersebut.

Jika peraturan di Indonesia tidak mengisyaratkan tes medis dan psikologis dalam perpanjangan surat izin pemakaian senjata api, maka berbeda di Ceko diharuskan melalui tes medis dan psikologis pada setiap perpanjangan. Dalam hal kepemilikan senjata api pula, Indonesia hanya mengisyaratkan batasan usia saja tanpa ada penggolongan usia dengan senjata api yang boleh dipergunakan dan keperluannya terhadap senjata api tersebut, berbeda dengan Ceko yang menjelaskan secara rinci batasan dan penggolongan usia penggunaan senjata api berdasar keperluan dan jenis senjata api nya untuk mencegah penyalahgunaan senjata api dan memantau penggunaan senjata api tersebut.

Pada kesimpulannya, berdasarkan kelemahan pengaturan terkait izin pemakaian/penggunaan dan kepemilikan senjata api penulis mencoba menawarkan solusi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan/pemakaian senjata api dalam konsep pengulangan tahap tes medis dan psikologis serta kelayakan setiap masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan surat izin pemakaian senjata api dengan perubahan atas pasal yang mengatur mengenai perpanjangan surat izin pemakaian senjata api dengan menambahkan syarat tes kesehatan dan psikologis serta melakukan uji kelayakan sebagai syarat perpanjangan izin. Kemudian pada konsep selanjutnya, penulis memberikan solusi untuk adanya penjabaran lebih lanjut mengenai penggolongan batasan usia untuk kepemilikan dan pemakaian senjata api disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan waktu dan jenis senjata api yang disesuaikan dengan kategori yang nantinya ada. Dengan kondisi masyarakat dan alam Indonesia

serta kegiatan masyarakatnya, maka penulis mencoba memberikan gambaran penggolongan pemberian izin pemakaian senjata api di Indonesia sebagai berikut :

Table 3. Konsep lisensi untuk penerapan di Indonesia

Kategori	Usia	Kategori kepemilikan senjata api	Catatan
Bela diri	21	Harus didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku	Diperbolehkan apabila lolos tes keseluruhan syarat mendapatkan surat izin pemakaian senjata api serta wajib lapor enam bulan sekali mengenai keberadaan senjata api sekaligus perpanjangan surat izin pemakaian senjata api
Koleksi	30	Harus didaftarkan dan terbuka mengenai keberadaan senjata api	Diwajibkan memperpanjang surat izin kepemilikan selama enam bulan sekali, tidak diperbolehkan untuk digunakan berkegiatan
Olahraga	18	Senjata api milik pemerintah, orang 18 tahun keatas diperbolehkan menggunakan namun sifatnya hanya sementara selama kegiatan olahraga berlangsung dan setelahnya akan dikembalikan kepada	

petugas yang ditugaskan untuk mengontrol keberadaan senjata api tersebut

Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah, 2021

Dari tabel diatas, dirumuskan 3 pembagian tipe lisensi yang penulis harap dapat berlaku di Negara Indonesia dalam hal pengaturan izin kepemilikan dan pemakaian senjata api kelak. Tipe pertama, tipe lisensi senjata api sebagai bela diri yang dapat dimiliki oleh warga negara sipil dengan usia minimal 21 tahun dan harus didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku agar dapat memiliki izin kepemilikan senjata api serta dengan pembatasan jumlah senjata dan amunisinya serta wajib lapor enam bulan sekali mengenai keberadaan senjata api sekaligus perpanjangan surat izin pemakaian senjata api. Tipe kedua adalah tipe lisensi untuk koleksi yang izinnya dapat dimiliki warga sipil dengan usia minimal 30 tahun dengan harus didaftarkan dan terbuka mengenai keberadaan senjata api tersebut, dan diwajibkan memperpanjang surat izin kepemilikan selama enam bulan sekali, tidak diperbolehkan untuk digunakan berkegiatan. Tipe yang ketiga adalah tipe lisensi untuk keperluan Olahraga yang izinnya dapat dimiliki apabila usia mencapai 18 tahun, senjata api milik pemerintah, orang 18 tahun keatas diperbolehkan menggunakan namun sifatnya hanya sementara selama kegiatan olahraga berlangsung dan setelahnya akan dikembalikan kepada petugas yang ditugaskan untuk mengontrol keberadaan senjata api tersebut. Menurut penulis dengan adanya lisensi seperti diatas yang diterapkan oleh Negara Ceko dapat menata dan memetakan persebaran jenis senjata api berdasar dengan fungsinya yang sesuai dengan umur masyarakatnya agar masyarakat dapat menggunakan senjata api dengan tertata, dengan keperluan yang memang dibutuhkan serta membantu negara pula untuk mengontrol persebaran senjata api.

Upaya diatas merupakan suatu konsep hasil analisis penulis yang nantinya diharap bisa dituangkan dalam rumusan pembaharuan atas Undang-undang mengenai peraturan tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api untuk menekan dan lebih menselektifkan izin pemakaian senjata api hanya bagi profesi tertentu saja dengan alasan memang dinilai

pantas untuk mengantongi izin pemakaian senjata api yang pada akhirnya bertujuan pula untuk menekan angka penyalahgunaan senjata api.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kelemahan pengaturan terkait pendaftaran izin kepemilikan dan penggunaan/pemakaian senjata api baik yang ada didalam Undang-undang no 8 tahun 1948 maupun Perkapolri no 18 tahun 2015 belum adanya pengaturan secara khusus mengatur terkait pembagian lisensi jenis senjata api, keperluannya, dan usia dari seseorang yang hendak melakukan pendaftaran izin kepemilikan dan penggunaan/pemakaian senjata api di negara Indonesia ini. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari pengaturan terkait izin pemakaian dan kepemilikan senjata api di negara Republik Indonesia jika dibandingkan dengan pengaturan serupa yang ada di negara Republik Ceko. Dimana berdasarkan pasal 16 ayat (2) Undang-undang Tentang Senjata Api dan amunisi Negara Republik Ceko (*Act on Firearms and Ammunition Of Czech Republik*) mereka lebih jelas dalam mengatur terkait izin kepemilikan dan penggunaan/pemakaian senjata api bagi masyarakat sipil di negaranya.
- 2) Berdasarkan kelemahan pengaturan terkait izin pemakaian/penggunaan dan kepemilikan senjata api penulis mencoba menawarkan solusi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan/pemakaian senjata api dengan konsep pengulangan tahap tes medis dan psikologis serta kelayakan setiap masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan surat izin pemakaian senjata api. Kemudian pada konsep selanjutnya, solusi untuk adanya penjabaran lebih lanjut mengenai penggolongan batasan usia untuk kepemilikan dan pemakaian senjata api disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan waktu dan jenis senjata api yang disesuaikan dengan kategori yang nantinya ada.

B. Saran

- 1) Kepada Pemerintah serta aparaturnegara yang berwenang terkhususnya pihak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislasi agar dapat merumuskan pembaharuan Undang-undang terkait peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian dan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia, dan dengan penelitian ini salah satunya diharapkan dapat menjadi dasar atas pembaharuan Undang-undang terkait senjata api dimasa yang akan datang.
- 2) Diharapkan kedepanya dalam pembuatan Undang-undang baru terkait senjata api, konsep pengulangan tahap tes medis dan psikologis serta kelayakan setiap masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan surat izin pemakaian senjata api agar dapat dimasukan dalam syarat perizinannya. Kemudian perlu adanya konsep penggolongan kategori lisensi atas pemberian izin pemakaian senjata api di Indonesia dengan sistem pembatasan usia, jenis senjata api, dan kebutuhan atas hak kepemilikan senjata api tersebut sesuai dengan kategori golongannya. Penjabaran lebih lanjut mengenai pengglongan batasan usia untuk kepemilikan dan pemakaian senjata api disesuaikan dengan kebutuhan msyarakat dengan waktu dan jenis senjata api yang disesuaikan dengan kategori yang ada

Daftar Pustaka :

Buku

Adam Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana,**

Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

A. Josias Simon R, **Senjata Api dan Penanganan Tindak kriminal,** Yayasan

Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016.

Bambang Sutiyoso, **Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum**

yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2006.

Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan**

Penanggulangan Kejahatan. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Budi Ruhiatudin, **Pengantar Ilmu Hukum,** Teras, Yogyakarta, 2009.

B. S. Pramono, **Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum,** Usaha Nasional,

Surabaya, 2006.

Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, **Penelitian Hukum,** Cet. Ke-3, Sinar

Grafika, Jakarta, 2018.

E. Utrech, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia,** PT Ichtiar Baru, Jakarta, 2013;

Haniah Hanifie dan Ana Sabhana Azmy, **Kekuatan-kekuatan Politik,** Depok

Rajawali Pers, 2018;

I. Gede Pantja Astawa, **Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di**

Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2008;

Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,** Balai Pustaka, Jakarta,

1989;

Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan**

Praktik Peradilan; PT Alumni, Bandung, 2009;

Mahrus Ali, **Dasar-dasar Hukum Pidana,** Sinar Grafika, Jakarta, 2011;

Masruchin Rubai, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001;

Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2005.

Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011;

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Perdana Media, Jakarta, 2005;

Roni Wijayanto, **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2012;

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Samosir, Djisman, **Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia**, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Sari Ratu P, **Penyalahgunaan Senjata Api oleh Kepolisian**, Tujuh Tera, Palembang, 2012;

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta 1984;

Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016;

Sudikno Metokusumo, **Mengenali Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Jogjakarta, 2006;

Suharto, **Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana**, Pramedia Group, Jakarta, 2013;

Suryanto, **Pengantar Ilmu Politik**, Bandung, Pustaka Setia, 2018;

Suwarni, **Pendidikan Kewarganegaraan**, Jakarta, Arya Duta, 2011;

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin

Pemakaian Senjata Api;

Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang perubahan atas *Ordonantie*

Tijdelijke Byondere Strafbepalingen (Stbl 1948 no 17);

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Perppu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut

Undang-Undang Mengenai Senjata Api;

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang

Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar

Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional

Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;

Skripsi

Fadlyansyah, Muh. Abdillah, **Tinjauan Kriminologis Terhadap**

Penyalahgunaan Senjata Api (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun

2010-2014), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015;

Leonard Kristianto H, **Pelaksanaan Pengawasan dan Kewenangan Polri**

Terhadap Kepemilikan Senjata Api Berdasarkan Pasal 15 ayat (2)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

Indonesia, UB, Malang, 2013;

Morvey Daniello, **Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api**

Diluar Pelaksanaan Tugas Jabatan Oleh Oknum Polri, UB, Malang,

2015;

Muhammad Yurwanra, **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil**, UMP, Palembang, 2016;

Jurnal

Herlin Eka Yusman, 2015, **Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Yang Beredar Di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif Dan Interpretatif Dalam Kriminologi)**, Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12;

Mochamad Parmudi. Kebangkitan Civil Society Di Indonesia. Fisip UIN Walisongo. Jurnal atTaqqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015;

Rozi, dkk., 2019, **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Pasca Perdamaian Di Aceh: Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Timur**, USU Law Journal, Vol.7. No.2, Juni 2019;

Sonya Airini Batubara, 2018, **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil (Putusan Nomor: 79/Pid.B/2016/Pn.Blg)**, Jurnal Hukum Kaidah.

Internet

<https://www.liputan6.com/news/read/4129031/polisi-gerebek-pabrik-rakitan-senjata-ilegal-di-lumajang> diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 10.13

<https://nasional.okezone.com/read/2019/12/26/337/2146088/kompolnas-polisi-harus-perketat-pengawasan-penggunaan-senpi-oleh-warga-sipil> diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 10.38

<https://jatim.sindonews.com/read/16884/1/mabuk-pria-di-kota-malang-tembakkan-senpi-di-tempat-karaoke-1575029467> diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 10.42

<https://seykab.go.id/penguasaan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21.42

<https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/fungsi-hukum-menurut-pakar/>
diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 21.42

<https://news.detik.com/berita/d-4154533/divonis-bui-seumur-hidup-ini-jejak-kasus-dr-helmi-tembak-dr-letty>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 12.24

Ibnu Hariyanto, 'Tembak dr Letty, Dokter Helmi Divonis Penjara Seumur Hidup' (detikNews 2018) <https://news.detik.com/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 12.24

Pusat Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, **Kontroversi Kepemilikan Senjata Api oleh Warga Sipil**, diakses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-10-II-P3DI-Mei-2012-9.pdf, pada Sabtu 20 Februari 2021 pukul 22.09 WIB

Tempo.Co, Pemilik Senjata Api Harys Miliki Izin Kepemilikan Senjata Api, diakses dari Tempo.Co pada 11 Maret 2021 pukul 10.07 WIB

